

Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia dan Malaysia dalam Sektor Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2006-2010

Al-Kharitza Rahman Hakim

*Alumni Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: rizalarh@yahoo.co.id

ABSTRACT

Bilateral economic cooperation had been made between Indonesia and Malaysia to respond global demand on crude palm oil as a trade commodity. This study uses demand theory, the concept of bilateral economic cooperation, and interdependence to analyze the case. This study also uses quantitative-descriptive to process the data. The research question of this study is what causes the signed of the MoU 2010 between Indonesia and Malaysia? The MoU is dealing with the negative campaign of the crude palm oil commodity. Before the MoU 2010, both government had been had cooperation on investment, workers, and land reform. Both Indonesia and Malaysia are also very aware in the potential of the crude palm oil as a trade commodity, thus they drove bilateral cooperation to ensure their exports to other countries. Theses negative campaigns and negative issues are the catalysts on the sign of the MoU 2010 between Indonesia and Malaysia.

Keywords: *Indonesia, Malaysia, Bilateral Economic Cooperation, Crude Palm Oil*

Untuk menghadapi permintaan akan minyak sawit dunia, maka Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama dalam sektor komoditi kelapa sawit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori permintaan, kerjasama ekonomi bilateral, dan interdependensi untuk menganalisis kajian didalamnya, dan dalam tipe penelitian penulisan ini menggunakan deskriptif-kuantitatif untuk mengolah data yang ada. Dalam penelitian ini terdapat isu yang dapat dijadikan rumusan masalah, yaitu apa latar belakang terjadinya MoU 2010 yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia? MoU ini berisi tentang kerjasama kedua negara dalam menghadapi isu tentang kampanye negatif terkait komoditi kelapa sawit, sebelum MoU 2010 ditandatangani, pada tahun 2006 dan tahun 2008 Indonesia dan Malaysia juga menyepakati MoU tentang pengembangan lahan, investasi, dan tenaga kerja. Pemerintah kedua negara sadar betul akan potensi di sektor kelapa sawit ini yang sangat potensial dan menguntungkan negara maka dari itu keduanya membuat MoU tentang kelapa sawit ini guna meningkatkan produksi kelapa sawit yang akan di ekspor ke negara-negara yang membutuhkan komoditi ini. Dari isu-isu inilah yang akhirnya pada tahun 2010 dibuat MoU dan disepakati oleh Indonesia-Malaysia untuk menghadapi kampanye negatif yang nanti dampaknya kurang baik bagi pertumbuhan komoditi kelapa sawit ini.

Kata Kunci: *Indonesia, Malaysia, Kerjasama Ekonomi Bilateral, Minyak Kelapa Sawit*

Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan negara penghasil dan pengeksport kelapa sawit terbesar di dunia, karena komoditi ini juga yang membuat kedua negara menjadi pemain utama dalam perdagangan minyak sawit dunia. Di Indonesia produk komoditi kelapa sawit merupakan salah satu produksi perkebunan terbesar dan juga sebagai salah satu penghasil devisa negara. Sampai saat ini kelapa sawit masih menjadi

komoditas tanaman perkebunan yang potensial mengisi peluang di pasar domestik maupun internasional. Industri kelapa sawit yang kemudian diproses menjadi minyak mentah kelapa sawit CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan komoditi yang serbaguna dalam industri makanan dan kimia, dan permintaan kelapa sawit yang juga meningkat karena digunakan sebagai bahan baku bahan bakar nabati. *Biofuel*/energi biodiesel tersebut juga dapat menjadi salah satu alternatif pilihan pengganti sumber energi minyak bumi yang semakin menipis, selain itu biodiesel ini merupakan bahan bakar ramah lingkungan. (Sinaga dan Hendarto, 2012)

Komoditas minyak sawit mentah Indonesia mempunyai daya saing yang cukup diperhitungkan oleh negara-negara eksportir CPO lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak terbesar dunia saat ini, sedangkan Malaysia berada pada peringkat kedua (Sinaga dan Hendarto, 2012). Jika dilihat dari sektor sumber daya alam Indonesia memang lebih unggul daripada Malaysia, Indonesia masih mempunyai cadangan ketersediaan sumber daya lahan yang cukup luas karena sampai saat ini kelapa sawit memang merupakan komoditi yang paling mendominasi luas areal perkebunan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar lebih mengembangkan perkebunan kelapa sawit sehingga Indonesia masih dapat terus berpeluang untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Lalu pada sektor ketenagakerjaan Indonesia memiliki tenaga kerja yang memadai, sementara Malaysia memiliki permodalan yang kuat dan kemampuan teknis yang memadai. Kedua negara ini memiliki kekuatan mengembangkan industri minyak kelapa sawit sebagai bentuk aliansi untuk mengisi kebutuhan dunia akan komoditas minyak sawit (Sinaga dan Hendarto, 2012). Komoditi kelapa sawit ini tentunya berperan besar dalam mendorong berkembangnya sektor ekonomi masing-masing negara, dan juga bisa menjadi faktor pengentas kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja bagi masing-masing negara (Indonesia Eximbank, 2014). Adapun kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara terkait dengan komoditas kelapa sawit adalah dengan adanya nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda tangani pada tahun 2006, 2008, dan 2010. Fokus ekonomi antara keduanya adalah dalam hal peningkatan produksi dalam komoditi kelapa sawit dikarenakan adanya permintaan pasar yang potensial, peningkatan produksi ini dilakukan dalam hal pengembangan lahan, investasi, dan juga tenaga kerja yang banyak guna kebutuhan pemenuhan produksi kelapa sawit, karena proses produksi tanaman kelapa sawit hanya dapat menggunakan tenaga manusia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam studi ini adalah setelah terbentuknya MoU 2006 dan 2008 apa yang melatarbelakangi terbentuknya MoU 2010 antara Indonesia dan Malaysia tentang kampanye negatif?

Pembahasan

Latar belakang ekonomi bilateral melalui kerjasama yang dilakukan dengan adanya kesepakatan yang dicapai dan selanjutnya diwujudkan dalam berbagai kegiatan operasional yang melibatkan pihak pemerintah dan terutama dunia usahadari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama. Walaupun demikian, dalam kerjasama bilateral masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) diantara pihak-pihak yang bekerjasama. Dalam rangka itu, diperlukan suatu upaya penilaian dan evaluasi yang seksama terhadap kinerja yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat, serta secara optimal mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan yang

dibutuhkan untuk lebih meningkatkan daya saing dan daya guna kerjasama yang dilakukan bersama (Lembaga Pendidikan Tinggi, 1997).

Hubungan ekonomi setidaknya mencakup tiga hubungan, antara lain 1) pertukaran hasil atau *output* negara satu dengan negara lainnya, *output* bisa berupa barang atau jasa, 2) pertukaran atau aliran sarana produksi (faktor produksi) seperti tenaga kerja, modal, teknologi dan tidak berlaku pada bantuan kewiraswastaan lainnya. Modal disini juga termasuk penanaman modal asing maupun bantuan luar negeri, 3) hubungan utang-piutang (kredit) sebagai konsekuensi dari hubungan perdagangan. Pada dasarnya hubungan kredit termasuk semua batuan luar negeri berupa pinjaman lunak. Namun kredit ini tidak berlaku pada bantuan yang berbentuk hibah (Boediono, 1981).

Permintaan dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga menurut Sadorno Sukirno (Abdul Rasul, 2012). Menurut Vincent Gaspersz permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan penerimaan penjualan perusahaan tersebut, dan oleh karena itu permintaan menjadi perhatian utama setiap perusahaan. Pada tingkat harga yang konstan, semakin tinggi permintaan konsumen maka penerimaan penjualan perusahaan juga semakin meningkat, demikian sebaliknya jika permintaan konsumen menurun maka penerimaan penjualan perusahaan akan menurun. Perusahaan berani mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengaktifkan permintaan konsumen, manakala kemungkinan penerimaan penjualan yang diperoleh menghasilkan laba. Hendry Faisal Noor mengatakan ada beberapa faktor-faktor penentu permintaan di antaranya adalah pertama pendapatan konsumen merupakan faktor penentu permintaan konsumen tersebut terhadap suatu barang dan jasa, kedua penawaran produksi barang dan jasa baru sebagai akibat dari inovasi yang dilakukan sehingga menciptakan penawaran, ketiga harga barang itu sendiri, keempat corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, kelima selera konsumen, keenam jumlah penduduk, dan yang terakhir ekspektasi mengenai keadaan di masa datang (Abdul Rasul, 2012).

Interdependensi dalam politik internasional dipengaruhi oleh situasi oleh efek resiprokal (timbal balik) antara berbagai negara atau antara aktor-aktor di berbagai negara. Efek ini biasanya didapatkan sebagai hasil dari transaksi internasional—aliran uang, barang, orang dan pesan komunikasi yang melintasi batas-batas wilayah. Beberapa transaksi telah meningkat drastis sejak PD II, yakni beberapa dekade belakangan ini memperlihatkan suatu kecenderungan akan berbagai bentuk keterkaitan antar manusia yang melintasi batas-batas negara akan semakin meningkat setiap sepuluh tahun. Keterkaitan ini tidaklah sama dengan interdependensi, efek transaksi dari interdependensi akan tergantung kepada hambatan dan biaya.

Interdependensi menurut Soeprapto adalah, menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang berinteraksi di dalamnya. Saling ketergantungan menyebabkan adanya interaksi antar Negara. Menurut Mohtar Mas'ood, interdependensi adalah sebagai kontak atau pertukaran (*exchange*) diantara bangsa-bangsa, interdependensi timbul akibat tindakan suatu pemerintah dan sebagian oleh pemerintah lain. Pengertian interdependensi ini bersifat positif, karena bisa membuka suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Secara umum Interdependensi adalah ketergantungan antara pihak satu dengan pihak yang lain, dalam penelitian ini dikhususkan antar negara yang saling membutuhkan akan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh satu negara sehingga membutuhkan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan begitu sebaliknya (Soeprapto, 2004).

Fakta bahwa sektor-sektor ekonomi Malaysia ditopang oleh 2,3 juta tenaga kerja asing yang lebih dari lima puluh persen berasal dari Indonesia, mengharuskan kedua negara terus mengawal interdependensi dan jejaring agar pertumbuhan ekonomi yang dirasakan beberapa tahun belakangan ini dapat terus terjaga. Hal ini diungkapkan oleh Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur pada acara sosialisasi mengenai peraturan terkait penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri kepada lebih kurang enam puluh perwakilan perusahaan yang berasal dari Johor, Melaka dan Pahang pada 20 Februari 2014 di Johor Bahru. Diungkapkan pula bahwa Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki regulasi pada tingkat nasional dan untuk mengatasi berbagai perbedaan maka telah dijembatani oleh beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU).

Berbagai peraturan yang ada itupun dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan sebanding kepada para tenaga kerja termasuk kepada perusahaan yang mempekerjakannya. Konsul Jenderal RI Johor Bahru Taufiqur Rijal dalam kesempatan ini menyatakan bahwa manajemen perusahaan merupakan mitra kerja perwakilan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Indonesia yang berada di negara akreditasi. Karena itu, diharapkan kerja sama yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Kampanye negatif dari penelitian ini adalah isu negatif yang di sebar oleh pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pecinta lingkungan, industri kelapa sawit dianggap sebagai kontributor utama kerusakan hutan/deforestasi, rusaknya keanekaragaman hayati dan habitat satwa langka, meningkatnya CO₂ akibat dari pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkendali. Dari isu lingkungan yang disebarkan oleh pihak LSM ini bisa saja ditanggapi oleh kepentingan yang mungkin merasa dirugikan dan ingin mengambil *market share* dari Indonesia dan Malaysia.

Produk kelapa sawit Indonesia dan Malaysia sudah tidak diragukan lagi kualitasnya sehingga dipercaya oleh beberapa negara besar untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit nasionalnya. Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia di urutan pertama dan Malaysia di urutan kedua, dapat dibuktikan dari kuota ekspor kedua negara. Total kebutuhan minyak sawit dunia, 80 persen dipasok dari Indonesia dan Malaysia sehingga jenis komoditi kelapa sawit ini sudah pasti sangat menguntungkan dan sangat potensial kedepannya apalagi didukung oleh sumber daya alam yang memadai, tetapi bukan berarti tidak ada hambatan atas kesuksesan kedua negara tersebut dalam mengolah tanaman kelapa sawit dan menjadikan sebagai devisa negara yang besar (Perkebunan Nusantara XIII, 2007).

Kemudian pada tahun 2010, dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa pasar ekspor utama dari Indonesia tidak lagi Uni Eropa melainkan India dengan nilai ekspor sebesar US\$ 3,63 milyar (47,44%), diikuti ekspor ke Malaysia yaitu sebesar US\$ 1,06 milyar (13,85%), Belanda sebesar US\$ 800 juta (10,47%), Italia sebesar US\$ 474 juta (6,20%), Singapura sebesar US\$ 460 juta (6,02%), Jerman sebesar US\$ 240 juta (3,14%), dan Spanyol sebesar US\$ 230 juta (3,01%). Dari data tersebut dapat terlihat bahwa meskipun Malaysia merupakan negara produsen kelapa sawit tetapi pada kenyataannya Malaysia masih mengimpor CPO dari Indonesia. Selain mengekspor CPO, Indonesia juga mengekspor minyak inti sawit mentah ke beberapa negara tujuan, antara lain Malaysia, Cina, Belanda, India, dan negara lainnya (Kementerian Pertanian, 2011).

Pada data tahun 2010 yang telah diteliti, data yang didapatkan menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor utama minyak inti sawit mentah pada tahun 2010 sebesar 37,78% diekspor ke Malaysia dengan nilai ekspor sebesar US\$ 553 juta, kemudian ke Cina sebesar 20,22%, Belanda sebesar 20,11%, India sebesar 14,55%, dan negara lainya sebesar 7,34%. Dari data ini juga menunjukkan bahwa selain Malaysia masih mengimpor CPO ternyata juga masih mengimpor minyak inti sawit mentah dari Indonesia. Malaysia mengimpor bahan baku tersebut untuk kemudian diolah lagi menjadi produk turunan yang nanti memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Pada tahun 2009, total produksi minyak sawit di dunia mencapai 45,08 juta ton (81,82% dari total Indonesia dan Malaysia). Indonesia mengalami numlah peningkatan jumlah produksi yaitu menjadi 19,32 juta ton (42,86%), sedangkan Malaysia mengalami penurunan jumlah produksi yaitu menjadi 17,56 juta ton (38,96%). Kemudian pada tahun 2010, total produksi minyak sawit di dunia mencapai 44,35 juta ton (82,86% dari total Indonesia dan Malaysia). Indonesia mengalami peningkatan jumlah produksi lagi pada tahun ini yaitu mencapai 19,76 juta ton (44,55%), sedangkan Malaysia mengalami penurunan lagi menjadi 16,99 juta ton (38,31%).

Tingkat pertumbuhan produksi minyak sawit di Indonesia selama tahun 2006-2010 mengalami masa terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar -0,70 persen padahal pertumbuhan produksi tahun sebelumnya mencapai 1,80 persen. Sementara itu Malaysia justru mengalami masa tertinggi dalam periode yang sama mencapai 12,07 persen. Namun pada tahun berikutnya 2009, pertumbuhan minyak sawit Malaysia mengalami penurunan tajam menjadi -0,95 persen, sementara Indonesia mengalami peningkatan menjadi 10,17 persen. Indonesia dan Malaysia akan terus menjadi pemain utama dalam ekspor minyak kelapa sawit mengingat belum adanya perkembangan yang signifikan dari negara-negara penghasil minyak sawit lainnya.

Keberhasilan Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, bukan hanya karena faktor-faktor lingkungan (kesesuaian lahan, iklim, dan sebagainya), tetapi juga karena adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kelapa sawit. Dukungan pemerintah Indonesia dalam sektor minyak sawit diwujudkan dalam kerangka kerja kebijakan pemerintah, peraturan dan perundang-undangan, sebagai berikut 1) kebijakan perdagangan untuk menghambat ekspor, stabilisasi harga minyak goreng dan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri diterapkan melalui penggunaan instrumen pajak ekspor, 2) kebijakan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui penggunaan instrumen pajak penghasilan, pertambahan nilai dan retribusi, 3) kebijakan yang berkaitan dengan perijinan usaha/investasi, yaitu adanya integrasi vertikal antara kebun kelapa sawit dengan pengolahan dan integrasi horizontal antara kebun kelapa sawit dengan usaha lainya, 4) sebagai bank tabungan negara (Pola BTN), dimana investor/perusahaan membangun keduri atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang bergabung dalam koperasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2007).

Sementara itu pemerintah Malaysia sangat mendukung pengembangan industri minyak kelapa sawit dengan diberlakukanya landasan hukum yang kuat dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang efektif. Dukungan pemerintah Malaysia dalam sektor minyak sawit diwujudkan dalam pengembangan industri berbasis CPO yaitu *The Third National Agricultural Policy (NAP3) 2005-2010* dan *The Second Industrial Master Plan (IMP2) 1996-2005*. Dalam hal peningkatan produksi tentunya banyak faktor yang harus dipenuhi oleh produsen kelapa sawit, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa lahan yang luas, iklim yang sesuai, pemenuhan tenaga

kerja merupakan faktor operasional yang penting dan juga dukungan dari pemerintah juga sangat penting karena pemerintah yang akan mengawasi serta meregulasi segala proses yang ada guna kelancaran produksi. Kedua negara sangat fokus dalam hal peningkatan produksi kelapa sawit yang membuat keduanya saling ketergantungan dalam pemenuhan barang dan jasa. Indonesia membutuhkan investasi dan pembelian minyak kelapa sawit dari Malaysia, sedangkan Malaysia sendiri juga sangat membutuhkan investasi di Indonesia dan tentunya pemenuhan tenaga kerja dari Indonesia. Pada akhirnya Interdependensi antar kedua negara sangat terlihat pada fokus peningkatan produksi komoditi kelapa sawit kedua negara, dimana peningkatan produksi ini dapat membangun ekonomi kedua negara ditunjang dengan permintaan pasar yang sangat potensial yang membuat Indonesia dan Malaysia ingin terus meningkatkan tren positif ini.

Indonesia dan Malaysia pada tanggal 25 Mei 2006 menandatangani memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai kerjasama bilateral atas komoditi. Komoditas perkebunan yang dimaksud dalam MoU tersebut antara lain: kelapa sawit, lada, kakao, jarak pagar dan produk-produk lainnya. Masa berlaku MoU adalah 5 tahun terhitung mulai penandatanganan yaitu 25 Mei 2006 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Sedangkan cara pengakhiran MoU dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. MoU tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi kedua negara sebagai negara pemasok komoditas perkebunan terbesar dunia, terutama pada komoditas kelapa sawit, dimana produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 80% dari total produksi minyak dunia dan hampir 90% dari perdagangan minyak sawit dunia. Hal tersebut memicu Indonesia dan Malaysia untuk bersaing dengan minyak dan lemak lainnya dalam kepentingan minyak sawit di pasar dunia. Dalam hal ini, kerjasama pembentukan MoU tersebut akan meningkatkan kesinambungan industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia dalam pangsa pasar minyak dunia. Selain itu Kementerian Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia menyebutkan bahwa akan dibangun sebuah mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi peningkatan keahlian yang efektif dan lancar serta informasi teknis yang berkaitan dengan pemasaran komoditas dan produk. Kerjasama ini lebih kepada inisiatif pemerintah dalam membangun industri komoditas tersebut. Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan dalam bentuk penetapan jumlah output yang akan diproduksi, karena Indonesia disini merasa khawatir jika Malaysia mencabut investasinya yang pada akhirnya akan mengurangi volume produksi kelapa sawit yang dihasilkan dan akan menyebabkan menurunnya keuntungan Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk Malaysia, karena Malaysia juga memiliki kendala dalam keterbatasan lahan dan keterbatasan tenaga kerja (MPOA Annual Report, 2006).

Investasi pada komoditi kelapa sawit sangat potensial baik pada industri hulu, yaitu perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan CPO, kemudian pabrik pengolahan minyak sawit, dan pada industri hilirnya. Kondisi lingkungan Indonesia sangat potensial dan dengan adanya peran pemerintah dalam perkebunan khususnya kelapa sawit. Kesuksesan dan kelancaran pengembangan perkebunan kelapa sawit ini tergantung pada komitmen investasi, dimana sebelum melakukan investasi di sektor komoditi kelapa sawit ini para investor harus bersungguh-sungguh menyadari bahwa diperlukan dana yang besar dan waktu pengambilan yang lama atau tidak dapat ditarik kembali dan apabila pembukaan lahan sudah dilakukan maka investasi tidak bisa ditunda lagi dan harus dilakukan sampai kebun selesai dibangun (Pahan, 2006).

Banyak investor Malaysia yang berminat menanamkan investasinya pada lahan perkebunan di Indonesia yang dianggap strategis dalam pengembangan produksi kelapa sawit karena sulitnya mencari lahan kosong di Malaysia. Pada tanggal 11 Januari 2008, kedua negara menandatangani MoU antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai pembentukan komite perdagangan dan investasi bersama. Kerjasama ini merupakan bagian dari agenda konsultan tahunan Indonesia dan Malaysia. MoU ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang otomatis setiap 3 tahun berikutnya. Kemudian, cara pengakhirannya dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlakuhabis. Penandatanganan MoU ini ditandatangani di Malaysia oleh menteri perdagangan RI, Mari Elka Pangestu dan menteri perdagangan Malaysia, Rafidah Aziz yang disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi yang didampingi menteri dan pejabat masing-masing negara (Kementerian Dalam Negeri Indonesia, 2014).

Terjadi peningkatan pesat dalam konsumsi minyak nabati dunia dari 118 juta ton pada tahun 2003-2007 menjadi 132 juta ton pada tahun 2008-2012, dimana penggunaan komoditi minyak kelapa sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar minyak nabati dunia, yaitu dengan total konsumsi 25 juta ton pada tahun 2003-2007 dan 29 juta ton pada tahun 2008-2012 (Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, 2009). Komoditi selanjutnya adalah minyak kedelai dengan total konsumsi 22 juta ton 2003-2007 dan 25 juta ton 2008-2012. Investasi pada komoditi kelapa sawit sangat potensial baik pada industri hulu, yaitu perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan CPO, PKO, kemudian pabrik nabati lainnya. Minyak sawit diperkirakan akan mampu memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan global dan domestik. Tuntutan kebutuhan tersebut muncul sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pergeseran konsumsi dari minyak jenuh hewan ke minyak nabati, pergeseran bahan bakar dari minyak fosil ke minyak nabati. Dengan melihat potensi dan peluang kelapa sawit tersebut mengindikasikan bahwa kelapa sawit masih mempunyai prospek pengembangan positif ke depan (Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, 2009).

Dalam hal peningkatan produksi tentunya banyak faktor yang harus dipenuhi oleh produsen kelapa sawit, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa lahan yang luas, iklim yang sesuai, pemenuhan tenaga kerja merupakan faktor operasional yang penting dan juga dukungan dari pemerintah juga sangat penting karena pemerintah yang akan mengawasi serta meregulasi segala proses yang ada guna kelancaran produksi.

Kedua negara sangat fokus dalam hal peningkatan produksi kelapa sawit yang membuat keduanya saling ketergantungan dalam pemenuhan barang dan jasa. Indonesia membutuhkan investasi dan pembelian minyak kelapa sawit dari Malaysia, sedangkan Malaysia sendiri juga sangat membutuhkan investasi di Indonesia dan tentunya pemenuhan tenaga kerja dari Indonesia. Pada akhirnya Interdependensi antar kedua negara sangat terlihat pada fokus peningkatan produksi komoditi kelapa sawit kedua negara, dimana peningkatan produksi ini dapat membangun ekonomi kedua negara ditunjang dengan permintaan pasar yang sangat potensial yang membuat Indonesia dan Malaysia ingin terus meningkatkan tren positif ini. Setelah keberhasilan kedua negara dalam menjadi pemain kelapa sawit terbesar di pasar dunia bukan berarti tidak ada hambatan dalam proses produksi yang dilakukan antara kedua negara, setelah MoU 2006 dan 2008 disepakati antara Indonesia dan Malaysia ada beberapa LSM pecinta lingkungan internasional yang mengancam produksi kelapa sawit kedua negara, mereka menganggap dengan adanya MoU tentang pengembangan lahan dan investasi, industri kelapa sawit dianggap sebagai kontributor utama kerusakan

hutan/deforestasi, rusaknya keanekaragaman hayati dan habitat satwa langka, meningkatnya CO₂ akibat dari pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkendali.

Setelah itu muncul kampanye negatif tentang kelapa sawit yang ada di Indonesia dan Malaysia, dan hal ini membuat resah kedua negara karena bisa menghambat proses produksi sawit dan kekhawatiran yang paling penting adalah turunya kepercayaan dari para konsumen/para importir akan kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia, isu ini membuat kedua negara fokus untuk melakukan kerjasama dalam melakukan upaya menghadapi kampanye negatif kelapa sawit ini bersama.

Keberhasilan Indonesia dan Malaysia dalam mempertahankan tren positif sebagai pemain utama kelapa sawit terbesar di dunia sedang dihadapkan pada isu yang kurang baik, LSM pecinta lingkungan sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang isu negatif terkait komoditi kelapa sawit yang ada di Indonesia dan Malaysia. Beberapa LSM pecinta lingkungan melakukan aksi-aksi kampanye, karena mereka menganggap bahwa industri ini dapat merusak hutan dan mengganggu stabilitas habitat disekitarnya. Indonesia dan Malaysia mencoba untuk berupaya menghadapi isu-isu negatif yang dapat berpengaruh pada permintaan kelapa sawit, dan isu ini dapat merugikan kedua negara jika saja sampai ada negara konsumen kelapa sawit yang terpengaruh akan hal ini, dan dari isu ini kedua negara sepakat untuk bersama-sama menghadapi kampanye negatif yang diwujudkan dalam *memorandum of understanding* yang akan dibahas di sub-bab berikutnya.

Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar, maka Indonesia dan Malaysia menyepakati MoU tentang kerjasama untuk menjamin usaha bersama atas produsen CPO. Hal tersebut terkait dengan upaya kedua negara dalam menghadapi kampanye negatif tentang kelapa sawit. MoU ditandatangani pada tahun 2010 di Jakarta, dimana penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Pertanian Indonesia, Suswono dan Menteri Perusahaan Perladangan dan komoditas Malaysia, Tan Sri Bernard Dompok.

MoU tersebut ditandatangani oleh LSM masing-masing negara, yaitu LSM Malaysia yang diantaranya adalah Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (*Malaysian Palm Oil Association/MPOA*), Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia (APIMI), Asosiasi Pemilik Kebun Sawit Serawak (SOPPOA), dan Otoritas Federal Pengembangan Lahan Malaysia (FELDA), sementara dari Indonesia adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Dewan Minyak Sawit Indonesia. Kepala Bidang Luar Negeri Gapki, Purboyo Guritno, menyatakan bahwa MoU tersebut mengatur empat hal yang penting untuk keberlangsungan industri kelapa sawit dua negara, yaitu, 1) pembentukan komite pelaksana yang akan memberikan masukan kepada para anggota terkait dengan kegiatan di *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sekaligus memastikan kepentingan para produsen dalam forum tersebut terlindungi (Lestari, 2010); 2) memfasilitasi formasi dari *sub working group* untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara teknis terkait dengan topik pengembangan industri kelapa sawit yang lestari, emisi rumah kaca, teknis perkebunan, dan pengembangan areal kelapa sawit; 3) kerjasama pengembangan *market intellegent* dan promosi, kampanye positif untuk pengembangan sawit lestari secara global; dan 4) adanya dukungan dari pemerintah dua negara untuk memastikan kepentingan bersama berkelanjutan untuk para produsen sawit.

Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia menyepakati terbentuknya *Indonesia-Malaysia Palm Oil Group* (IMPOG) yang merupakan wadah/forum antar produsen kelapa sawit

Indonesia dan Malaysia untuk menyusun program kerjasama, *research and development* (R&D), komunikasi dan strategi agar mempunyai persepsi yang sama dalam upaya menghadapi tekanan asing yang ingin menekan industri kelapa sawit kedua negara. Pertemuan kedua negara tersebut berlangsung di Kuching (Malaysia) pada tahun 2010. IMPOG beranggotakan enam asosiasi, diantaranya adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), *Malaysian Palm Oil Association* (MPOA), Asosiasi Pemilik Perkebunan Minyak Sawit Serawak (SOPPOA), *Federal Land Development Authority* (FELDA), dan Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia (APMI). IMPOG dipimpin oleh APMI yang sekaligus akan menjadi sekretariat dan kemudian akan berganti masa jabatan setiap dua tahun sekali. Dengan adanya kerjasama dan disepakatinya MoU antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil minyak sawit menunjukkan adanya aliansi dari produsen sawit untuk merespon dan menghadapi tekanan dari kelompok LSM/NGO lingkungan anti sawit.

Industri minyak kelapa sawit mengalami peningkatan pertumbuhan dan menjadi kontributor penting dalam pasar minyak nabati dunia, sehingga mendorong berbagai pihak baik itu pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Walaupun industri tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia dan Malaysia, namun bagi beberapa negara dan para lembaga pecinta lingkungan, industri ini mendapat kritikan sebagai kontributor utama deforestasi dan dianggap penyebab emisi gas rumah kaca. Semakin meningkatnya permintaan akan produk minyak sawit beserta produk olahan lainnya yang ramah lingkungan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat negara maju akan pentingnya lingkungan hidup, dimana produk yang tidak ramah lingkungan dipersepsikan sebagai produk yang tidak berkesinambungan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan mempengaruhi cara beroperasi industri-industri kelapa sawit, terutama di Indonesia dan Malaysia karena kedua negara ini sebagian besar produk olahannya ditujukan untuk pasar ekspor.

Dalam situasi tertekan isu negatif mengenai pembangunan kelapa sawit, maka Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama untuk menghadapi isu negatif dari beberapa LSM/NGO pecinta lingkungan terkait dengan kerusakan hutan akibat dari peningkatan luas lahan dan produksi/aktivitas kelapa sawit kedua negara tersebut. Industri ini dianggap bertanggung jawab atas penggundulan hutan, emisi karbon, dan hilangnya keberagaman hayati. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pihak, seperti negara kompetitor minyak nabati lainnya yang menunggangi isu mengenai tuduhan-tuduhan ini, karena terjadinya pergeseran penggunaan sumber minyak nabati dari minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji matahari, dan minyak canola ke minyak kelapa sawit. Peningkatan produksi dan konsumsi minyak sawit di dunia telah mengurangi permintaan terhadap minyak nabati lainnya yang selama ini dihasilkan oleh sebagian besar negara-negara barat.

Bila semua isu positif dalam budidaya dan pengelolaan sistem budidaya perkebunan kelapa sawit dapat diinformasikan ke seluruh pelosok dunia, maka gelombang isu negatif akan dapat ditepis, dan semua pihak dapat merasakan manfaatnya dari hasil perkebunan kelapa sawit nasional. Komoditas kelapa sawit telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, serta menjadi sektor yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga koordinasi kinerja, termasuk kampanye positif harus dilakukan secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Tan Sri Bernard Dompok menyatakan sangat mungkin adanya pihak-pihak yang menunggangi kampanye hitam

(black campaign) atau pun tuduhan-tuduhan miring bagi para produsen sawit Indonesia maupun Malaysia khususnya soal perusakan lingkungan dalam industri kelapa sawit. "Mungkin-mungkin juga, karena kelapa sawit ini komoditi yang ada kompetitornya, seperti rapseed oil," kata Tan Sri Bernard Dompok usai acara Memorandum of Collaboration antara 6 asosiasi sawit Indonesia-Malaysia di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ia mengatakan, banyak kemungkinan para NGO yang melaporkan tuduhan miring tidak tahu persis kondisi kedua negara dalam proses menanam kelapa sawit. Sehingga para organisasi pecinta lingkungan tersebut tidak mendapat informasi yang utuh.

Sementara itu Menteri Pertanian Suswono menambahkan secara regulasi pemerintah Indonesia sudah sangat tegas dalam hal pembukaan lahan untuk perkebunan khususnya sektor sawit. Ia mencontohkan sudah ada regulasi soal pelarangan pembukaan lahan sawit diatas kedalaman 3 meter. "Memang dalam setiap areal tidak semuanya memiliki kedalaman flat," kata Suswono. Seperti diketahui, kedua negara penghasil sawit terbesar di dunia ini kerap kali terkena tuduhan miring dan sepihak oleh lembaga-lembaga pecinta lingkungan terkait pembukaan lahan sawit dan prosesnya. Beberapa kasus pembatalan kontrak seperti yang dialami Sinar Mas oleh Unilever menjadi contoh telak masalah ini. Unilever sebelumnya telah memutuskan kontrak secara sepihak pembelian CPO kepada Sinar Mas (SMART) karena pihak Unilever mendapat laporan dari Green Peace (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, 2010).

Mentan Suswono mengatakan, Indonesia-Malaysia merupakan produsen terbesar yang menguasai 85 produksi CPO dunia yang bila bersatu bisa menjadi penentu harga. Sayangnya, lanjut dia, CPO menghadapi isu negatif terutama di Eropa bahwa industri sawit merusak hutan, sehingga RI-Malaysia harus bekerjasama menghadapi kampanye negatif dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ia berharap bila ada isu negatif dari LSM, maka dibentuk lembaga independen untuk melakukan penilaian secara ilmiah, apakah benar pengembangan industri sawit suatu perusahaan tidak lestari. Dengan demikian ia berharap kasus pemutusan kontrak sepihak oleh pengguna CPO seperti Unilever, tidak terjadi lagi. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Tan Sri Bernard Dompok menambahkan, RI dan Malaysia sebagai dua produsen terbesar memiliki posisi yang kuat dalam Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, 2010).

Sementara itu Ketua Umum GAPKI Joefly Bachroeny mengatakan sesama produsen CPO merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi tekanan baik dalam forum RSPO maupun forum internasional lainnya, terkait isu pembangunan industri sawit lestari dan reduksi emisi rumah kaca. "Karena itu harus ada kerjasama (produsen CPO RI-Malaysia) dalam bentuk lebih kongkrit dan dilakukan secara terencana dan sistematis," katanya. Ketua MPOA Dato Mohamad Saleh mengatakan produsen CPO juga harus waspada menghadapi isu lingkungan lainnya yang akan dikembangkan LSM seperti pemakaian tanah tidak langsung. Jika selama ini pengusaha kelapa sawit Malaysia dan Indonesia selalu "bersaing" di pasar internasional, kali ini mereka bersatu. Disaksikan Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditas Malaysia, kesepakatan koalisi itu diteken sejumlah pimpinan industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Dari Indonesia antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Sedangkan dari Malaysia adalah Malaysian Palm Oil Association (MPOA), The Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association (SOPPOA), FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan), dan APIMI (Plantation Investors of Malaysia in Indonesia).

Kedua negara Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama bilateral dengan menyepakati beberapa *Memorandum of Understanding* terkait dengan komoditi kelapa sawit yang menjadi produk unggulan kedua negara dan dengan demikian kedua negara bisa menghadapi tantangan global kedepannya. MoU antara Indonesia dan Malaysia tersebut menyepakati tentang perdagangan, investasi, tenaga kerja dan kampanye menghadapi isu lingkungan.

Pertama Dalam sektor perdagangan, perdagangan minyak sawit dunia semakin baik dengan adanya peningkatan konsumsi minyak sawit dunia. Sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit, maka Indonesia dan Malaysia pada tanggal 25 Mei 2006 menandatangani MoU kerjasama bilateral di bidang ekonomi atau perdagangan mengenai pengembangan komoditas perkebunan yang bertujuan untuk memperkuat posisi kedua negara sebagai pemasok komoditas perkebunan terbesar dunia, terutama kelapa sawit, dimana produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 80 persen dari total minyak sawit dunia.

Kedua adalah sektor Investasi, kerjasama ini ditandai dengan adanya penandatanganan MoU kerjasama bilateral mengenai Investasi bersama pada tanggal 11 Januari 2008. Minat investor Malaysia dalam menanamkan investasi pada komoditi kelapa sawit di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki lahan yang luas yang masih bisa dikembangkan lagi sedangkan lahan di Malaysia luas akan lahan untuk penanaman kelapa sawit semakin sempit. Ketiga tentang transfer tenaga kerja, TKI menduduki jumlah pekerja terbesar di Malaysia karena hampir 50 persen pekerja migran Malaysia berasal dari Indonesia dan sebagian besar bekerja di sektor perkebunan.

Ketiga sektor diatas merupakan isi MoU dari kedua MoU yang telah disepakati pada tahun 2006 dan 2008. Setelah itu muncul isu negatif tentang kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, isu inipun yang akhirnya melatarbelakangi terbentuknya MoU 2010. *Memorandum of Understanding* tahun 2010 ini mengenai kerjasama untuk menghadapi kampanye negatif dari para NGO atau LSM pecinta lingkungan tentang Industri kelapa sawit dan kesepakatan terbentuknya *Indonesia-Malaysia Palm Oil Group* (IMPOG) yang merupakan forum antar produsen kelapa sawit Indonesia dan Malaysia.

Kesimpulan

Hubungan suatu negara terhadap negara lain merupakan bukti bahwa setiap negara tidak dapat hidup sendiri untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya dan mencapai tujuan negara tersebut terlebih lagi perkembangan dunia yang semakin modern dan kompleks yang membuat masing-masing negara semakin terpacu untuk lebih meningkatkan hubungannya dengan negara lain. Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit dengan berbagai macam produk olahan melakukan kerjasama untuk memperkuat posisi masing-masing negara di mata internasional. Tentunya dalam peningkatan produksi harus diimbangi dengan permintaan yang tinggi yang membuat produksi semakin efektif, selain itu kerjasama yang dilakukan kedua negara juga tidak kalah pentingnya karena Indonesia-Malaysia juga saling bergantung dalam hal investasi dan pemenuhan tenaga kerja yang semakin menunjang peningkatan produksi.

Dengan adanya MoU 2006 dan 2008 yang telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia tentang Investasi dan pengembangan lahan yang merupakan latar belakang disepakatinya MoU 2010, dimana setelah disepakati MoU 2006 dan MoU 2008 menimbulkan kampanye negatif dari para LSM pecinta lingkungan. Beberapa LSM pecinta lingkungan melakukan aksi-aksi kampanye, karena mereka menganggap bahwa industri ini dapat merusak hutan dan mengganggu stabilitas habitat disekitarnya. Dengan adanya kampanye negatif dari para LSM-LSM tersebut akhirnya Indonesia dan Malaysia membuat suatu kerjasama untuk menghadapi kampanye negatif tersebut demi melanjutkan kesuksesan kedua negara sebagai pemain utama minyak kelapa sawit dunia.

Industri kelapa sawit dianggap sebagai kontributor utama kerusakan hutan/deforestasi, rusaknya keanekaragaman hayati dan habitat satwa langka, meningkatnya CO₂ akibat dari pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkontrol. Isu ini merupakan persaingan non harga berupa isu lingkungan dan isu keanekaragaman hayati. Dengan isu-isu negatif terkait yang ada mengenai kelapa sawit dapat membahayakan posisi Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak sawit terbesar didunia karena para negara pengimpor bisa saja mengurungkan niat untuk terus mengimpor kelapa sawit ke negaranya karena dianggap berbahaya dan dapat dicekal penjualannya di pasar internasional. Isu ini juga bisa saja ditanggung oleh para negara produsen kelapa sawit lain yang ingin mengambil *market share* dari Indonesia dan Malaysia.

Daftar Pustaka

- Abdul, Agung Rasul. 2012. *Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Boediono. 1981. *Pengantar Ilmu Ekonomi No 3: Ekonomi Internasional*. BPFE. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Pers. Chapter I. *Interdependence in World Politics* New York. Longman Publishing.
- Departemen Perindustrian. 2007. *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa sawit*. Diena Lestari. 2010. *Produsen CPO RI-Malaysia Bergandeng Tangan*. [online] dalam <http://www.bumn.go.id>. Diakses pada 12 April 2014.
- Drs. R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Prilaku*. 2004. Faizal, Henry Noor. *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ismawanto. 2009. *Ekonomi 2 : Untuk SMA dan MA Kelas XI*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- John W. Creswell. 2009. *“Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches”*. California: Sage Publications. Hal: 148-161.
- Keohane, Robert and Joseph Nye. *Power and Interdependence* 3rd Edition. 2001.
- Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Edisi 1 Januari Tahun 2001, FISIP UNRI, 2001

- Krauss, Ellis S. dan T.J.Pempel. 2004. *Beyond Bilateralism: US-Japan Relations in the New Asia Pacific*. Stanford University Press. USA.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Pahan, Iyung. 2006. *Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*. Paradiredja, Ace. *Pengantar Ekonomika*, (Yogyakarta : BPFE, 2002).
- Prof. Dr. Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)". Bandung : Alfabeta CV.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Rosyidi, Suherman. 2004. *Pengantar teori ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sinaga, Dina Maria dan Mulyo Hendarto. 2012. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara*. Diponegoro Journal of Economics Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.
- Singer, David J (1961). "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wilson, Bangun. 2007. *Teori Ekonomi Mikro*. Bandung. Penerbit Refika Aditama.